

GAMBARAN PENGELOLAAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018

Marisco Kohar, Chreisy K. F. Mandagi*, Grace E. C. Korompis**

**Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Manado*

ABSTRAK

Program Keluarga Berencana merupakan suatu kebijakan pemerintah Indonesia yang dipandang paling efektif untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Alat dan obat kontrasepsi digunakan sebagai instrumen dalam pelayanan program keluarga berencana. Pengelolaan alat dan obat kontrasepsi menjadi faktor penting untuk menentukan berjalannya program keluarga berencana, Dengan mengelola alat dan obat kontrasepsi, ketersediaan alat dan obat kontrasepsi dapat terjangkau sehingga pelaksanaannya bisa berjalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan alat dan obat kontrasepsi yang dilakukan di BKKBN Provinsi Sulawesi Utara. metode yang digunakan adalah wawancara dan observasi yang dilakukan kepada pegawai yang terlibat. Dari hasil penelitian menunjukkan proses penyimpanan masih belum sesuai aturan penyimpanan dan proses distribusi masih mengalami keterlambatan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan, pengelolaan alat dan obat kontrasepsi di BKKBN Provinsi Sulawesi Utara, masih belum efektif dan efisien.

Kata Kunci : *Pengelolaan obat, BKKBN, alat kontrasepsi*

ABSTRACT

Family Planning Program is a policy of the Indonesian government which is seen as the most effective way to control the rate of population growth. Contraception tools and drugs are used as instruments in the service of family planning programs. The management of contraceptive devices and drugs is an important factor to determine the running of the family planning program. By managing contraceptive devices and drugs, the availability of contraceptive devices and drugs can be affordable so that the implementation of the family planning program can run. The purpose of this study was to find out how the process of managing contraceptive drugs and drugs was carried out in the North Sulawesi Province BKKBN. the methods used are interviews and observations made to the employees involved. From the results of the study, the storage process is still not in accordance with the rules of storage and the distribution process is still experiencing delays. Based on the results of these studies it can be concluded, the management of contraceptive devices and drugs in the North Sulawesi Province BKKBN, is still not effective and efficient.

Keywords: *Drug management, BKKBN, contraception*

PENDAHULUAN

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu kebijakan pemerintah Indonesia yang dipandang paling efektif untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, pemerintah telah mencanangkan program Keluarga Berencana (KB) untuk membina akseptor sekaligus mencapai fungsi yang telah ditetapkan untuk memberi kontribusi demi tercapainya upaya mewujudkan keluarga berkualitas.

Alat dan obat kontrasepsi merupakan salah satu bagian penting yang digunakan sebagai instrumen dalam pelayanan Keluarga Berencana. Pengelolaan alat dan obat kontrasepsi merupakan faktor penting yang menentukan kesuksesan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam menjalankan program KB. Dengan mengelola alat dan obat kontrasepsi, ketersediaan alat dan obat kontrasepsi dapat terjangkau sehingga pelaksanaan program KB dapat berjalan.

Proses pengelolaan alat dan obat kontrasepsi dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi manajemen logistik yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penghapusan, dan pencatatan pelaporan. Tugas dan fungsi

BKKBN Provinsi Sulawesi Utara salah satunya adalah mengelola alat dan obat kontrasepsi di tingkat Provinsi dan mempunyai peran penting dalam menjaga ketersediaan, proses distribusi hingga tahap pemusnahan alat dan obat kontrasepsi

Berdasarkan pengambilan data awal yang dilakukan peneliti, didapatkan beberapa hal yang tidak sesuai dengan aturan pengelolaan alat dan obat kontrasepsi, yaitu: gudang penyimpanan alat dan obat kontrasepsi tidak sesuai dengan aturan gudang, yang seharusnya menjaga kestabilan suhu serta memisahkan alat dan obat kontrasepsi dengan alat non-kontrasepsi; proses distribusi yang terhambat karena keterlambatan data F/V/KB atau data permintaan dari BKKBN Kabupaten dan Kota dan pihak BKKBN Provinsi yang melakukan distribusi langsung ke BKKBN Kabupaten dan Kota tanpa melakukan perhitungan sesuai dengan rumus yang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh Karlida (2017) di gudang industri farmasi diketahui bahwa penyimpanan obat disuhu yang tidak dijaga dan dikendalikan dapat menyebabkan ketidak efektifan obat, toksisitas, berubahnya bioavailabilitas obat, hilangnya keseragaman kandungan obat, menurunkan nilai jual produk dan

'*patient acceptability*', hilangnya kekedapan kemasan, dan menurunnya kualitas label. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Sinta (2014) di UPTKB (Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana) Kecamatan Ciparay, diketahui bahwa proses distribusi alat dan obat kontrasepsi sering terhambat karena keterlambatan data pesanan/permintaan, sehingga UPTKB tidak bisa melakukan distribusi, hal ini menyebabkan penumpukan alat dan obat kontrasepsi sehingga ada anggaran tambahan untuk pemeliharannya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, Penelitian ini dilakukan di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Utara pada bulan September 2018 sampai bulan Desember 2018. Keseluruhan informan berjumlah 4 orang, yaitu semua pegawai BKKBN yang terlibat dan bertanggung jawab dalam pengelolaan alat dan obat kontrasepsi. Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara dan observasi,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan kebutuhan

Proses perencanaan yang dilakukan di BKKBN Provinsi Sulawesi Utara

berdasarkan hasil penelitian dilakukan sekali setahun untuk memenuhi kebutuhan alat dan obat kontrasepsi di BKKBN maupun Dinkes Kabupaten dan Kota setiap triwulan, perencanaan kebutuhan dibuat berdasarkan Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM).

Pengadaan

Pengadaan dilakukan oleh pejabat pengadaan dari BKKBN Pusat dengan sepengetahuan Kepala sub-bagian keuangan dan BMN BKKBN Provinsi dan pelaksanaannya dilakukan di gudang penyimpanan dengan dibantu oleh petugas gudang. Kegiatan pengadaan alat dan obat kontrasepsi dilakukan setahun sekali setiap awal tahun dengan waktu yang dibutuhkan paling lama sekitar 3 bulan hingga kebutuhan persediaan terpenuhi.

Pengadaan sudah sesuai dengan prosedur namun masih ada kendala. Kendala yang dialami adalah kekeliruan pejabat pengadaan BKKBN Pusat yang salah atau tidak sesuai mengadakan alat dan obat kontrasepsi yang diminta sehingga dari pihak BKKBN Provinsi melakukan pengembalian dan akan dilakukan pengadaan kembali.

Penyimpanan

penyimpanan yang dilakukan oleh SDM yang mengelola gudang menggunakan

dua metode yaitu metode penyimpanan dan tempat penyimpanan, yang pertama menggunakan metode penyimpanan berupa FIFO dan FEFO, yang kedua berupa penyimpanan di tempat dengan suhu sejuk (15-20°C) dan suhu ruangan (15-30°C). proses penyimpanan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yang ada, dimana kegiatan petugas gudang pertama kali pada proses penyimpanan adalah memisahkan antara alat dan obat kontrasepsi yang akan di simpan pada tempat dengan suhu sejuk maupun tempat dengan suhu ruang, kemudian penataannya alat dan obat kontrasepsi yang baru masuk di letakkan pada bagian belakang, dan yang lama diletakkan dibagian depan.

Kendala yang dialami pada proses penyimpanan adalah kondisi gudang yang kurang diperhatikan, seperti suhu ruangan penyimpanan yang tidak bisa dikendalikan ketika terjadi pemadaman listrik. Berdasarkan petunjuk operasional penggunaan DAK fisik sub bidang KB pada kriteria sasaran nomor 3 disebutkan bahwa pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan serta biaya operasional untuk pemeliharaan rutin gudang penyimpanan. serta masih ada barang non-kontrasepsi yang disimpan dalam gudang penyimpanan. Berdasarkan Juknis DAK fisik sub bidang KB pada

pengertian gudang penyimpanan disebutkan bahwa gudang alat dan obat kontrasepsi adalah bangunan yang dikhususkan untuk menyimpan alat dan obat kontrasepsi untuk program KB sesuai standar. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyimpanan sudah sesuai dengan prosedur, kendala yang dialami hanya dari faktor sarana prasarana berupa gudang penyimpanan yang masih perlu diperhatikan.

Pendistribusian

Proses distribusi yang dilakukan oleh SDM yang mengelola kegiatan pendistribusian adalah; BKKBN dari Kabupaten dan Kota melaporkan data F/V/KB Kabupaten dan Kota ke BKKBN Provinsi untuk kemudian akan dilakukan penghitungan dengan rumus PPM untuk dijadikan rencana distribusi yang disetujui dan ditandatangani oleh kepala sub bagian keuangan dan BMN, yang kemudian pendistribusiannya dilakukan oleh petugas gudang di gudang penyimpanan BKKBN Provinsi. namun masih terdapat kendala, berupa terlambatnya laporan F/V/KB dari Kabupaten dan Kota dan hal ini harus ditanggulangi dengan cara melakukan distribusi secara langsung sedangkan persediaan di Kabupaten dan Kota masih mencukupi sehingga terjadi kelebihan

persediaan di gudang penyimpanan Kabupaten dan Kota.

Penghapusan

Penghapusan dilakukan dengan mengecek terlebih dahulu barang yang telah rusak, kadaluarsa, atau mengalami cacat dan dilaporkan kepada kepala keuangan dan BMN selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap barang milik Negara, kemudian dibentuk panitia penghapusan serta menetapkan tempat dan waktu penghapusan berdasarkan surat berita acara. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, digiling atau dikubur.

Pencatatan dan pelaporan

Pengendalian dilakukan terhadap jenis dan jumlah persediaan. Pengendalian dilakukan oleh petugas gudang dengan melakukan pencatatan pelaporan yang bertujuan untuk memastikan persediaan efektif dan efisien atau tidak terjadi kelebihan dan kekurangan/kekosongan, kerusakan, kadaluarsa, dan kehilangan serta pengembalian pesanan. Pencatatan pelaporan dibuat secara periodik dalam periode waktu tertentu (bulanan, triwulan, semester atau pertahun), dengan memperhatikan administrasi gudang seperti jumlah persediaan Alat dan Obat Kontrasepsi, SBBM, kartu

barang, kartu persediaan barang, buku penerimaan, SBBK.

KESIMPULAN

1. Perencanaan
Perencanaan dilakukan berdasarkan perkiraan permintaan masyarakat (PPM) atau metode konsumsi
2. Pengadaan
Pengadaan dilakukan digudang penyimpanan di Provinsi oleh pejabat pengadaan dari Pusat dengan dibantu petugas gudang, yang kegiatannya diketahui oleh kepala sub bagian keuangan dan BMN.
3. Penyimpanan
Penyimpanan yang dilakukan berdasarkan metode penyimpanan dan tempat penyimpanan, namun kondisi gudang penyimpanan masih perlu diperhatikan, karena dapat mempengaruhi mutu alat dan obat kontrasepsi.
4. Pendistribusian
Pendistribusian dilakukan dengan metode *pull distribution system* yaitu dengan surat permintaan atau disebut juga mekanisme distribusi alat dan obat kontrasepsi program KB nasional. Namun kadang dilakukan dengan distribusi langsung tanpa perhitungan minimum dan maksimum persediaan dan terjadi kelebihan

persediaan di gudang penyimpanan Kabupaten dan Kota.

5. Penghapusan

Penghapusan dilakukan dengan prosedur yang sudah ada, dan tidak ada kendala dalam proses penghapusan.

6. Pencatatan Pelaporan/ Pengendalian

Pengendalian dilakukan oleh petugas gudang yang sekaligus bendahara material dengan cara membuat pencatatan dan pelaporan, dengan memperhatikan administrasi gudang seperti jumlah persediaan Alat dan Obat Kontrasepsi, SBBM, kartu barang, kartu persediaan barang, buku penerimaan, SBBK.

SARAN

1. Bagi BKKBN Provinsi disarankan agar memperhatikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di gudang, serta menyesuaikan kondisi gudang dengan peraturan gudang penyimpanan alat dan obat kontrasepsi.
2. Disarankan agar melakukan koordinasi antara bidang pelaporan BKKBN Kabupaten Kota dengan BKKBN Provinsi agar tidak terjadi keterlambatan pemasukan data, serta pendistribusian dilakukan sesuai PPM dan rumus yang ada, agar tidak

terjadi kesalahan dalam pendistribusian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2018. *Profil BKKBN Provinsi Sulawesi Utara*.
- Mustafa, B. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Logistik*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Karlida, I. Ida, M. 2017. *Review: Suhu Penyimpanan Bahan Baku dan Produksi Farmasi di Gudang Industri Farmasi*. Bandung : Fakultas Farmasi, Universitas Padjadjaran. Vol. 15 No. 4.
- Anonim, 2017. *Petunjuk Operasional: Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Sub-Bidang Keluarga Berencana*.
- Hartanto, H. 2003. *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. Jakarta: CV. Mulia Sari.
- Devi, Y.S. 2014. *Pembangunan Sistem Informasi Distribusi Alat Kontrasepsi dengan Pendekatan Metode Supply Chain Management di Unit Pelaksanaan Teknis Keluarga Berencana (UPTKB) Kecamatan Ciparay*. Bandung : Teknik Informatika, Universitas Komputer Indonesia. Vol.3. No.3